

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap peneliti relevan dengan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan Yohanes Yoseph Geli Dera (2018) tentang Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Kota Jogo Di Desa Anakoli Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) aspek fasilitator bagi masyarakat atau pengunjung yang datang ke Pantai Kota Jogo belum ada pembangunan yang signifikan berkaitan dengan fasilitas di Lokasi Obyek Wisata Pantai Kota Jogo. (2) aspek koordinator belum ada peran nyata dari dinas pariwisata dan kebudayaan dalam pengembangan lokasi Obyek Wisata Pantai Kota Jogo. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Obyek Wisata Pantai Kota Jogo merupakan salah satu obyek wisata yang menyimpan banyak pesona alam yang perlu dijaga dan terus dikembangkan oleh pemerintah bersama masyarakat di Kota Jogo Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo. Saran yang dapat diajukan sebagai berikut: (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nagekeo diharapkan segera membangun tempat penjaga dan juga tempat parkir yang lebih baik. (2) diharapkan pemerintah baik dinas pariwisata maupun pemerintah desa terus mengupayakan pembangunan yang signifikan di Lokasi Obyek Wisata

Pantai Kota Jogo kearah yang lebih baik. (3) diharapkan pemerintah terus melakukan komunikasi yang baik antara sesama.¹

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Dominikus Tarru (2016) tentang Dampak Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Lasiana bagi masyarakat sekitarnya di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dampak Ekonomi: (a) Peningkatan Pendapatan dari hasil usaha masyarakat setelah beroperasinya Obyek Wisata Lasiana (b) Kesempatan kerja yang merekrut banyak orang untuk ikut terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. (c) Peluang Usaha yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Lasiana untuk membuka usaha. (2) Dampak Sosial: (a) Gaya hidup, dalam mengatur kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, perilaku di depan umum dan membedakan status dengan orang lain melalui lambang-lambang sosial. (b) Interaksi sosial, melalui hubungan-hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang dapat melahirkan komunikasi. Kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis terhadap Dampak Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Lasiana sebagai berikut: (1) Dampak Ekonomi: (a) Peningkatan Pendapatan (b) Kesempatan Kerja (3) Peluang Usaha. (2) Dampak Sosial: (a) Gaya Hidup (b) Interaksi Sosial. Saran yang dapat disampaikan sebagai berikut: (1) Diharapkan para pedagang agar tetap menjaga kebersihan dan kualitas barang jualan dan juga masyarakat lainnya, harus mempunyai semangat kerja

¹Yohanes Yoseph Geli Dera (2018) .Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Kota Jogo Di Desa Anakoli Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Katolik Widya Mandira. Kupang

untuk memperoleh hasil yang baik. (2) Diharapkan masyarakat agar tetap menjaga komunikasi yang baik dengan wisatawan dalam berinteraksi dan juga masyarakat itu sendiri serta toleransi kepada siapapun harus tetap ditingkatkan sehingga tercipta suasana yang lebih baik dan aman. (3) Diharapkan pemerintah agar lebih memperhatikan mengenai keadaan fasilitas-fasilitas obyek wisata pantai Lasiana yang belum di perbaiki atau di rehap, sehingga wisatawan lebih banyak tertarik untuk datang berkunjung dan juga masyarakat bisa mengalami suatu perubahan yang jauh lebih baik dari yang sekarang serta memberikan kursus bahasa inggris kepada para pedagang.²

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Kristoforus Sare (2017) tentang *Peran Masyarakat Dalam Mengembangkan Wisata Pantai Koka di Desa Wolowiro Kecamatan Paga Kabupaten Sikka*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam mengembangkan Wisata Pantai Koka yaitu masyarakat dengan kemauan sendiri ikut terlibat dalam mengelola wisata Pantai Koka dimana dilihat dari kesehariannya sebagai penjaga pintu masuk, petugas parkir, petugas keamanan pantai dan juga membuka fasilitas lain yang dibutuhkan oleh wisatawan. Sementara kendala-kendala dalam pengembangan Wisata Pantai Koka yaitu masih kurangnya dana dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola suatu daya tarik wisata alam. Adapun dampak pengembangan Wisata Pantai Koka terhadap Masyarakat Wolowiro yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi. Dampak sosial yaitu terjadi perubahan tingkah laku masyarakat dimana

²Dominikus Tarru (2016).Dampak Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Lasiana bagi masyarakat sekitarnya di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Jurusan Ilmu Pemerintahan.Universitas Katolik Widya Mandira.Kupang

dengan adanya pengembangan Wisata Pantai Koka masyarakat sudah mulai berpikir untuk membuka usaha di Sekitar Pantai Koka. Sedangkan dampak ekonominya ialah masyarakat merasa senang karena adanya wisata Pantai Koka sangat membantu perekonomian masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki usaha di Sekitar Pantai Koka. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Masyarakat Wolowiro dalam mengembangkan Wisata Pantai Koka adalah masyarakat dengan kemauan sendiri ikut terlibat dalam pengembangan Wisata Pantai Koka yaitu dilihat dari kesehariannya yaitu sebagai penjaga pintu masuk, petugas parkir, membuka tempat jualan dan lain sebagainya. Adapun kendala dalam pengembangan wisata Pantai Koka yang utama adalah dana. Sedangkan dampak dari pengembangan Wisata Pantai Koka yaitu terjadi dampak sosial dan dampak ekonomi bagi Masyarakat Desa Wolowiro.³

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pariwisata sedangkan perbedaannya adalah, *pertama* fokus kajian penelitian dimana peneliti memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, *kedua* lokasi wilayah penelitian dimana fokus wilayah penelitian adalah di Pantai Koka Kecamatan Paga Kabupaten Sikka.

³Kristoforus Sare (2017) .Peran Masyarakat Dalam Mengembangkan Wisata Pantai Koka di Desa Wolowiro Kecamatan Paga Kabupaten Sikka.Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan . Universitas Flores. Ende

2.2.Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

2.2.1. Pengertian

Partisipasi merupakan salah satu elemen yang krusial dan mutlak diperlukan dalam rangka pembangunan, terlebih jika dikaitkan dengan pergeseran paradigma pembangunan yang kini telah menempatkan manusia dan masyarakat sebagai sentral dalam pembangunan yang tidak hanya memandang masyarakat sebagai obyek yang dibangun tetapi sebagai subyek dari pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Conyers (1982) terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, yaitu Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat ukur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, dan kebutuhan masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui perihal proyek tersebut. Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.⁴

2.2.2. Tujuan Partisipasi Masyarakat

Tujuan partisipasi masyarakat menurut Schiller dan Antlov adalah membangun rencana yaitu setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Sedangkan manfaat yang

⁴Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu: Yogyakarta.

didapat menurut Westra, manfaat partisipasi, antara lain lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar dan dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari masyarakat.⁵

Manfaat yang diperoleh dari adanya partisipasi masyarakat, sebagaimana pendapat ahli menurut Westra manfaat partisipasi, antara lain :

- a. Lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar.
- b. Dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari masyarakat.
- c. Dapat mengembalikan nilai-nilai martabat manusia (human dignity), dorongan (motivasi) serta membangun kepentingan bersama.
- d. Lebih mendorong orang untuk lebih bertanggung jawab.
- e. Memperbaiki semangat bekerja sama serta menimbulkan kesatuan kerja.
- f. Lebih memungkinkan mengikuti perubahan-perubahan⁶

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pantai sangat dibutuhkan agar obyek pariwisata ini tidak hanya ada namun juga dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar pantai tersebut, dalam hal ini masyarakat dapat membangun beberapa tempat makan untuk para pengunjung dan juga dapat menambah ekonomi kebutuhan masyarakat tersebut. Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu, bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki/wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi

⁵ Ibid. Hal 1941

⁶ ibid

yang nyata misalnya, uang, harta benda, tenaga sedangkan bentuk partisipasi tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Menurut Holil (dalam Dwiyanti, 2013) mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi antara lain: (a) Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga dalam pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. (b) Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang tetapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan. (c) Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.⁷

Untuk Pengembangan masyarakat, perlu pemahaman dasar mengenai tingkatan partisipasi. Menurut Cohen dan Uphoff oleh soetomo (Dalam Deviyanti, 2013) membagi partisipasi masyarakat dalam pengembangan ke dalam tingkatan yaitu:

- (a) Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pengembangan dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pengembangan.

⁷Dewiyanti, 2013 Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat. ,(Surabaya: Usaha Nasional, 1993), Hlm .39

- (b) Partisipasi dalam pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa: partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk harta benda.
- (c) Partisipasi pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan . Partisipasi masyarakat pada tingkat ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.
- (d) Partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam memilih serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya.⁸

Ada juga beberapa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu program, timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, di mana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya 3 faktor utama yang mendukung, yaitu:

- Kemauan
- Kemampuan
- Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi rencana dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dikerjakan dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan atau kemampuan anggota masyarakat untuk

⁸Deviyanti, 2013 Pengembangan Pariwisata, Surabaya: Usaha Nasional, 1993), Hlm. 76

berkontribusi dalam pembangunan. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif dalam yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat.

Tingkatan partisipasi masyarakat digolongkan menjadi 4 indikator yaitu:

- Partisipasi dalam perencanaan, indikator dari partisipasi ini, adalah keterlibatan dalam bentuk kehadiran, menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan.
- Partisipasi dalam pelaksanaan, indikator dari partisipasi ini adalah keterlibatan dalam penyediaan tenaga sejak persiapan pelaksanaan kegiatan yang berupa pemeliharaan hasil-hasil.
- Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, indikator dari partisipasi ini adalah keterlibatan masyarakat dalam bentuk pemanfaatan hasil.
- Partisipasi dalam kegiatan evaluasi dan monitoring, indikator dari partisipasi ini adalah keterlibatan masyarakat dalam bentuk penyusunan pengendalian (melalui pelatihan partisipatif) dan pengumpulan data (melalui survey partisipatif).⁹

2.3. Kepariwisata

2.3.1 Pengertian Kepariwisata

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan

⁹Pamuji, 2002 Tingkatan partisipasi masyarakat. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 65

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.¹⁰

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang komponen-komponen terdiri dari pari yang artinya penuh, lengkap, berkeliling. Wis (man) yang artinya rumah, properti, kampung, komunitas. Ata yang artinya pergi terus menerus, mengembara yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan pariwisata, berarti pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus-menerus.

Norval menyatakan bahwa pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu negara, kota atau wilayah tertentu. Hunziker dan Kraft memberikan pengertian pariwisata adalah keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing dimana perjalanannya tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah.¹¹

Yoeti merumuskan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilakukan sementara waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan guna pertamasyaan dan rekreasi.¹²

Pendit menjelaskan pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan bisnis pemerintah tuan rumah masyarakat dan tuan

¹⁰Pasal 1 ayat (4). Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

¹¹ Norval, Kepariwisata dan perjalanan. Jakarta. 2016 Rajagrafindo, hlm 8-9

¹² Yoeti, pengantar ilmu pariwisata, angkasa, Bandung, 1996, hlm 118

rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya.¹³

Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara (dan) dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan mereka selama tinggal di tempat tujuan-tujuan itu. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dimaksud dengan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan-pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Dalam UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 1 menyatakan: Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.¹⁴ Sedangkan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai-nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan wisata.¹⁵

2.3.2. Unsur-unsur dalam kepariwisataan

Menurut Spillane ada lima unsur komponen pariwisata yang sangat penting, yaitu:

¹³ Pendith, Ilmu pariwisata (sebuah pengantar perdana), Pradya Paramita, Jakarta, 2003 hlm 34

¹⁴ Undang-Undang No. 10 tentang Kepariwisata Pasal 1 ayat (1)

¹⁵ Undang-Undang No. 10 tentang Kepariwisata Pasal 1 ayat (5)

a) *Attractions* (daya tarik) *Attractions* dapat digolongkan menjadi *site attractions* dan *event attractions*. *Site attractions* merupakan daya tarik fisik yang permanen dengan lokasi yang tetap yaitu tempat-tempat wisata yang ada di daerah tujuan wisata seperti kebun binatang, keratin, dan museum. Sedangkan *event attractions* adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat diubah atau dipindah dengan mudah seperti festival-festival, pameran, atau pertunjukan-pertunjukan kesenian daerah.

b) *Facilities* (fasilitas-fasilitas yang diperlukan) Fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Selama tinggal di tempat tujuan wisata wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum oleh karena itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan.

c) *Infrastructure* (infrastruktur) Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Perkembangan infrastruktur dari suatu daerah sebenarnya dinikmati baik oleh wisatawan maupun rakyat yang juga tinggal di sana, maka ada keuntungan bagi penduduk yang bukan wisatawan.

d) *Transportations* (transportasi) Dalam objek wisata kemajuan dunia transportasi atau pengangkutan sangat dibutuhkan karena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu perjalanan pariwisata. Transportasi baik transportasi darat, udara, maupun laut merupakan suatu unsur utama langsung yang merupakan tahap dinamis gejala-gejala pariwisata.

e) *Hospitality* (keramah tamahan) Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal memerlukan kepastian jaminan keamanan khususnya untuk

wisatawan asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan mereka datangi.¹⁶

2.3.3. Pengembangan Pariwisata

Menurut Sastrayuda mengemukakan dalam perencanaan pengembangan meliputi :

1. Pendekatan Participatory Planning, di mana seluruh unsur yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis.
2. Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata.
3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.
4. Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana.
5. Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.

¹⁶ Josie Gerald Meray, et.al. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Tata Kota. Universitas Samratulangi. Manado. Hal 49